

Penguatan Kesadaran Menyiapkan Generasi Anti-Golput untuk Pemilu yang akan Datang

Hesti Lusvita Dewi¹, Michell², Sania Valentina³, Vivi Enne Lim⁴, Steven⁵, Dicky Edyanto⁶, Isaac Julio Herodion⁷, Achmad Aji Satyo Utomo⁸, Marcella Susanti⁹, Felex Jonathan¹⁰, Andreas Valentino Pratama¹¹, Roshinta¹², Firo Enzo¹³, Tio Fanny Situmeng¹⁴, Intan Fitri Nursalim¹⁵

Universitas Internasional Batam

e-mail: 2241151.hesti@uib.edu¹, 2242101.michell@uib.edu², 2241153.sania@uib.edu³, 2241302.vivi@uib.edu⁴, 2241155.steven@uib.edu⁵, 2241152.dicky@uib.edu⁶, 2231105.isaac@uib.edu⁷, 2251101.achmad@uib.edu⁸, 2242100.marcella@uib.edu⁹, 2251036.felex@uib.edu¹⁰, 2231107.andreas@uib.edu¹¹, 2251102.roshinta@uib.edu¹², 2241154.firo@uib.edu¹³, 2251103.tio@uib.edu¹⁴, 2251105.intan@uib.edu¹⁵

Abstrak

Perilaku tidak memilih atau yang lebih dikenal sebagai golput (golongan putih) telah ada sejak pertama kali pemilu diselenggarakan dan semakin meningkat seiring dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah reputasi institusi politik dan kaitannya dengan skeptisisme masyarakat terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi dari pemilihan yang dilakukan. Penerapan sosialisasi pemilu di SMAS Kartini Batam demi meningkatkan kesadaran siswa untuk tidak menjadi bagian dari masyarakat golput diharapkan mampu membangun kesadaran siswa/i akan pentingnya menyuarakan hak dan menggunakan hak pilihnya. Edukasi berkenaan dengan pemilihan umum juga turut dilakukan sebagai upaya pemahaman lebih lanjut mengenai dunia politik yang sesungguhnya.

Abstract

Non-voting behavior or better known as golput has existed since the first election was held and has increased along with many influencing factors, one of which is the reputation of political institutions and its relation to public skepticism about changes that may occur from the election. The application of election socialization at SMAS Kartini Batam to increase students' awareness of not being part of the golput community is expected to build students awareness of the importance of voicing their rights and using their voting rights. Education regarding elections is also carried out as an effort to understand more about the real world of politics.

Keywords: Election, Abstention, Socialization, Politics, School

Pendahuluan

Menjelang tahun 2024 dimana pemilu serentak akan dilakukan, siswa serta golongan sejenisnya diimbau untuk dapat turut serta dalam prosesnya. Dalam hal ini, peran mahasiswa dalam sebuah perguruan tinggi dikatakan merupakan sebuah mitra yang strategis dalam hal pemberian informasi awal sampai dengan pengawasan proses pemilu hingga pelaporan, apabila terdapat indikasi pelanggaran. Demi

membangun kesadaran siswa akan pentingnya pengetahuan mengenai hak pilih dan memilih dalam pemilihan, maka dilaksanakannya sosialisasi ini bertujuan untuk dapat merealisasikan rangkaian kegiatan yang diniatkan sebagai upaya untuk memberikan informasi detil mengenai pemilihan umum itu sendiri. Pelaksanaan sosialisasi di lingkungan akademis memiliki andil yang cukup strategis dalam hal membangun karakter serta kesadaran berpolitik oleh siswa dan

bagaimana perilaku mereka berdampak untuk masa yang akan datang.

Tujuan dari penulisan artikel ini seperti yang telah dimaksud adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa dan mencegah mereka dari *abstain* terhadap pemilihan yang akan berlangsung nantinya serta pemaparan lebih lanjut mengenai rangkaian kegiatan sosialisasi dilakukan.

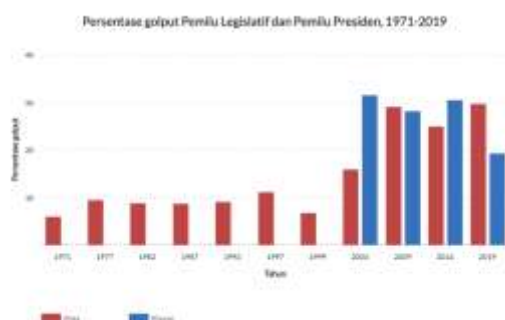
Masalah

Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Hanya saja, pada saat itu belum muncul istilah pengawasan pemilu. Istilah pengawasan pemilu sendiri baru muncul sekitar tahun 1980-an. Meski konflik ideologi yang bertentangan saat itu cukup kuat, dapat diaktakan bahwa kala itu minim terjadinya kecurangan dalam tahapan pemilunya. Karenanya, hingga sekarang, pemilu 1955 terbilang sebagai pemilu di Indonesia yang paling ideal. Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu pada pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh banyaknya protes atas pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya, muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan “kualitas” pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Hingga akhirnya dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Namun, selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari pengawas pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Sejak era reformasi, tren golput terus meningkat. Pada visualisasi grafik golput tahun 2004, jumlah golput pada pilpres lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah golput pada pileg. Sedangkan pada tahun 2019, persentase golput pada pileg yang justru naik dibandingkan

dengan golput pada pilpresnya. Jumlah tersebut juga terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2024.



Ada banyak indikator mengapa golput masih terus terjadi, mengingat generasi saat ini adalah generasi yang cukup melek terhadap perkembangan isu politik yang terjadi, di antaranya adalah golongan mereka yang merasa bahwa apa pun yang dipilih tidak akan pernah membawa perubahan berarti bagi bangsa. Ini jelas menjadi masalah sebab golongan tersebut terus meningkat dan pemaparan jumlah tersebut masih menandakan banyaknya masyarakat yang enggan untuk menyuarakan hak pilihnya selama pemilu berlangsung. Data yang ditampilkan juga membuktikan bahwasanya kenaikan tren golput masih akan terus meningkat seiring tahunnya, baik itu dalam ranah pileg maupun pilpres.

Metode

Sebelum sosialisasi dilakukan, tentunya ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan agar kelangsungan acara berjalan dengan baik. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Menentukan Jadwal Kunjungan Sosialisasi

Kelompok bersama dengan tim Bawaslu sesuai arahan pihak kampus dan konfirmasi sekolah terkait berdasarkan ketentuan jadwal kunjungan sosialisasi melaksanakan kegiatan pada hari

Kamis, 27 Juli 2023 mulai dari pukul 07.00 – 08.30 WIB.

2. Menyusun Rangkaian Kegiatan

Pembagian tugas oleh setiap delegasi kelompok dilakukan untuk meluncurkan kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap dibantu oleh pihak Bawaslu selama prosesi kegiatan berlangsung. Berikut adalah *rundown* kegiatan acara yang dilakukan, meliputi:

- Pembukaan oleh Kepala Sekolah SMA Kartini ditutup dengan doa bersama.
- Kata Sambutan dari Panwaslu Kota Batam.
- Penyampaian materi dan dokumentasi oleh delegasi Kelompok (Michell, Roshinta, Felex, Marcella, Aji dan Intan) mengenai dasar pemilu, lembaga pengawas pemilu, tahapan pemilu, syarat memilih, pengawasan partisipatif Bawaslu serta peran yang dimiliki siswa dalam pemilu. Selanjutnya, siswa juga diperkenalkan dengan website untuk melihat apakah siswa telah terdaftar sebagai pemilih dengan meng-*input* NIK KTP-nya dan membuat akun Jarimu Awasi Pemilu.
- Pemberian kuis terkait materi yang telah disampaikan serta pembagian hadiah kepada 3 pemenang kuis tersebut.
- Pembacaan deklarasi oleh seluruh siswa/i, anggota Bawaslu, Panwaslu, jejeran guru SMA Kartini, dan setiap delegasi kelompok.
- Acara ditutup dengan akhir kata oleh Panwaslu Batam dan foto bersama.

Pembahasan

Kegiatan sosialisasi pemilu di SMA Kartini sendiri dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juli 2023. Sebelum memulai kunjungan, delegasi kelompok beserta pihak Bawaslu memutuskan untuk melakukan *gathering* terlebih dahulu di parkiriran sekolah SMA Kartini. Setelah seluruh siswa diimbau untuk berkumpul di lapangan, selanjutnya Kepsek memulai acara dengan pembukaan kata sambutan diikuti oleh pihak Panwaslu Kota Batam.



Gambar 1. Kata Sambutan

Selanjutnya, penyampaian materi oleh delegasi kelompok meliputi pengetahuan tentang pemilu dan kelembagaannya sampai dengan pengenalan website untuk melihat daftar pemilih dan pembuatan akun Jarimu Awasi Pemilu.



Gambar 2. Pemaparan Materi Seputar Pemilu

Setelahnya, kegiatan dilanjut dengan pemberian kuis materi terkait oleh delegasi kelompok didampingi

pihak Bawaslu dan pembagian hadiah kepada 3 murid pemenang kuis.



Gambar 3. Pemenang Kuis Materi Terkait

Tahap akhir dari kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan kata sambutan dan foto bersama oleh seluruh pihak terlibat sebagai bukti kegiatan telah berjalan dengan lancar.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di SMA Kartini Batam merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah serta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap Golput, mengingat tingginya tingkat Golput ketika diadakannya pemilu di Indonesia. Disini para pelajar berperan sebagai calon pemilih pemula, oleh sebab itu diberikan arahan pengetahuan tentang pemilu dan kelembagaannya sampai dengan pengenalan website untuk melihat daftar pemilih dan pembuatan akun Jarimu Awasi Pemilu, agar mereka memberikan hak pilihnya di Pemilu 2024

ini. Kegiatan sosialisasai berjalan lancar dan para pelajar lebih mengenal sistem dalam pemilu.

Daftar Pustaka

- Bawaslu Nganjuk., (2020)., Pentingnya Peran Mahasiswa Dalam Pemilu.
<https://nganjuk.bawaslu.go.id/pentingnya-peran-mahasiswa-dalam-pemilu/>
- Bawaslu Kab. Bulungan., (n.d.)., Sejarah Pemilu.
<https://bulungan.bawaslu.go.id/sejarah/>
- Lokadata., (2019)., Persentase Golput Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, 1971-2019.
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/persentase-golput-pemilu-legislatif-dan-pemilu-presiden-1971-2019-1601357218>.
- Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Kencana
- Kamil, A. B. (2018). Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia. STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, 1(2)
- Efriza, E. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(1), 1-15